

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS EVALUASI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN  
JENIS IKAN YANG DILINDUNGI DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM  
DALAM APPENDIKS *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN  
ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi efektivitas pengelolaan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, perlu menetapkan Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
  3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  4. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora;
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1952);
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendix Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1880) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019

- tentang Perubahan Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1300);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
  8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT TENTANG PEDOMAN TEKNIS EVALUASI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN JENIS IKAN YANG DILINDUNGI DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA*

KESATU : Menetapkan pedoman teknis evaluasi efektivitas pengelolaan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Pedoman teknis evaluasi efektivitas pengelolaan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. kerangka evaluasi;

- c. tata cara evaluasi;
- d. pelaporan;
- e. penutup;
- f. lembar penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
- g. daftar pertanyaan dan dokumen alat verifikasi evaluasi efektivitas pengelolaan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
- h. simulasi perhitungan penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan jenis ikan;
- i. Form 1. Berita Acara Lokakarya/Workshop/FGD/pertemuan verifikasi; dan
- j. Form 2. Berita Acara Verifikasi Akhir Reviu.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pengelolaan Ruang Laut.

ttd.

TB. HAERU RAHAYU

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN RUANG LAUT  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS EVALUASI EFEKTIVITAS  
PENGELOLAAN JENIS IKAN YANG DILINDUNGI  
DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM  
APPENDIKS *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN  
ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA*.

PEDOMAN TEKNIS EVALUASI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN JENIS IKAN  
YANG DILINDUNGI DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM  
*APPENDIX CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN  
ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA*

A. Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati (kehati) yang tinggi dan beragam hingga dikenal sebagai salah satu pusat kehati global (*mega-biodiversity country*). Keanekaragaman tersebut mulai dari jenis flora, fauna yang didukung oleh posisi strategis Indonesia di segitiga karang dunia. Hingga tahun 2015, tercatat fauna laut Indonesia sebanyak 5.319 jenis yang terdiri dari 3.476 jenis ikan (*osteichthyes*), 557 jenis Echinodermata, 527 jenis cacing laut (*polychaeta*), 450 jenis karang, dan 309 jenis udang-udangan (Bappenas, 2016). Selain mencatatkan kehati untuk fauna, Indonesia juga telah mencatatkan kehati 1.114 jenis flora laut yang terdiri dari 971 jenis algae, 13 jenis lamun (*seagrass*), 55 jenis bakau (*true mangrove*), dan 75 jenis asosiasi mangrove. Spesies akuatik endemik yang hidup di Indonesia mencakup 440 spesies air tawar dan 97 spesies fauna yang hidup di ekosistem terumbu karang, di mana 25 spesies diantaranya adalah kelompok hiu dan pari.

Keanekaragaman hayati tersebut selain mempunyai peranan penting secara ekologi juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Peningkatan jumlah penduduk dan terbukanya akses pasar global telah menyebabkan tingginya tekanan pemanfaatan yang telah berdampak pada kerusakan ekosistem dan

mengancam kepunahan beberapa spesies di habitat alam. Terbukanya akses pasar global juga telah menggeser pola pemanfaatan sumber daya, yang pada awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar menjadi pemanfaatan untuk perdagangan komersial, sehingga menyebabkan tekanan yang lebih tinggi terhadap keberadaan jenis tersebut. Beberapa spesies di antaranya bahkan telah mengalami kepunahan di habitat alam.

Tekanan pemanfaatan yang berlebih dan kerusakan ekosistem telah menyebabkan beberapa spesies di antaranya rentan mengalami kepunahan. Ciri-ciri jenis yang rentan mengalami ancaman kepunahan di antaranya: langka, persebarannya terbatas (endemik), fekunditas rendah dan populasi yang mengalami penurunan secara drastis. Beberapa upaya konservasi terhadap keanekaragaman hayati dilakukan pada tiga level yaitu konservasi ekosistem, jenis dan genetik. Sampai dengan saat ini upaya konservasi yang dilakukan masih terbatas pada konservasi ekosistem dan konservasi jenis.

Dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati pada level jenis, saat ini telah disusun dokumen perencanaan yang meliputi dokumen *roadmap* konservasi jenis dilindungi dan terancam punah dan rencana aksi nasional jenis ikan untuk jangka waktu lima tahun. Strategi dan rencana aksi tersebut mengacu pada tiga upaya pokok konservasi jenis yaitu upaya perlindungan, upaya pelestarian dan upaya pemanfaatan berkelanjutan serta kegiatan lainnya yang terkait. Strategi pokok konservasi jenis ikan dilindungi dan terancam punah dilakukan melalui pengelolaan jenis dan habitat, penguatan kebijakan dan penegakan hukum, membangun kemitraan, meningkatkan akses pendanaan, dan penyadartahuan dan peningkatan kapasitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber daya ikan, konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber daya Ikan, proses penetapan status perlindungan jenis biota perairan terancam punah menjadi salah satu program di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sampai dengan tahun 2020, terdapat 8 (delapan) jenis ikan yang telah ditetapkan status perlindungannya melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Ikan Terubuk (*Tenuaulusa macrura*) dengan perlindungan terbatas waktu dan wilayah melalui Kepmen KP No 59/2011.
2. Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*) dengan perlindungan penuh melalui Kepmen KP No 18/2013.
3. Ikan Napoleon (*Cheilinus undulatus*) dengan perlindungan terbatas ukuran melalui Kepmen KP No 37/2013.
4. Ikan Pari Manta spesies *Manta alfredi* dan spesies *Manta birostris* dengan perlindungan penuh melalui Kepmen KP No 4/2014.
5. Bambu Laut (*Isis spp.*) dengan perlindungan penuh melalui Kepmen KP No 8/2020.
6. Ikan Terubuk (*Tenuaulusa ilisha*) dengan perlindungan terbatas waktu dan wilayah melalui Kepmen KP Nomor 43/2016.
7. Ikan Capungan Banggai (*Pterapogon kauderni*) dengan perlindungan terbatas waktu dan wilayah melalui Kepmen KP No 46/2014.
8. Ikan sidat (*Anguilla spp.*) dengan perlindungan terbatas melalui Kepmen KP No. 80/2020.

Selain itu telah diterbitkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 61 tahun 2018 tentang pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*. Peraturan tersebut mengatur tata cara pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan masuk dalam daftar *Appendix CITES*.

Dengan telah dilakukannya berbagai upaya pengelolaan terhadap jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, maka diperlukan adanya alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi upaya pengelolaan. Alat ukur tersebut akan menilai apakah upaya tersebut telah dilakukan memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*. Untuk itu perlu disusun suatu pedoman evaluasi yang dapat digunakan untuk menilai tingkat efektivitas pengelolaan yang telah dilakukan, dalam upaya menjaga agar sumber daya tersebut tetap lestari dan berkelanjutan.

## 1.2 Maksud dan tujuan

Penyusunan pedoman teknis evaluasi efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, dimaksudkan untuk menyiapkan panduan standar yang dapat digunakan bagi semua pihak dalam melaksanakan penilaian terhadap tingkat efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan/atau terancam punah di Indonesia.

Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah :

1. Menyediakan perangkat yang digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, yang telah dilakukan oleh pemangku kepentingan
2. Menyediakan perangkat untuk penyusunan rekomendasi pengelolaan jenis ikan dilindungi dan atau terancam punah dimasa yang akan datang.

## 1.3. Kerangka pikir

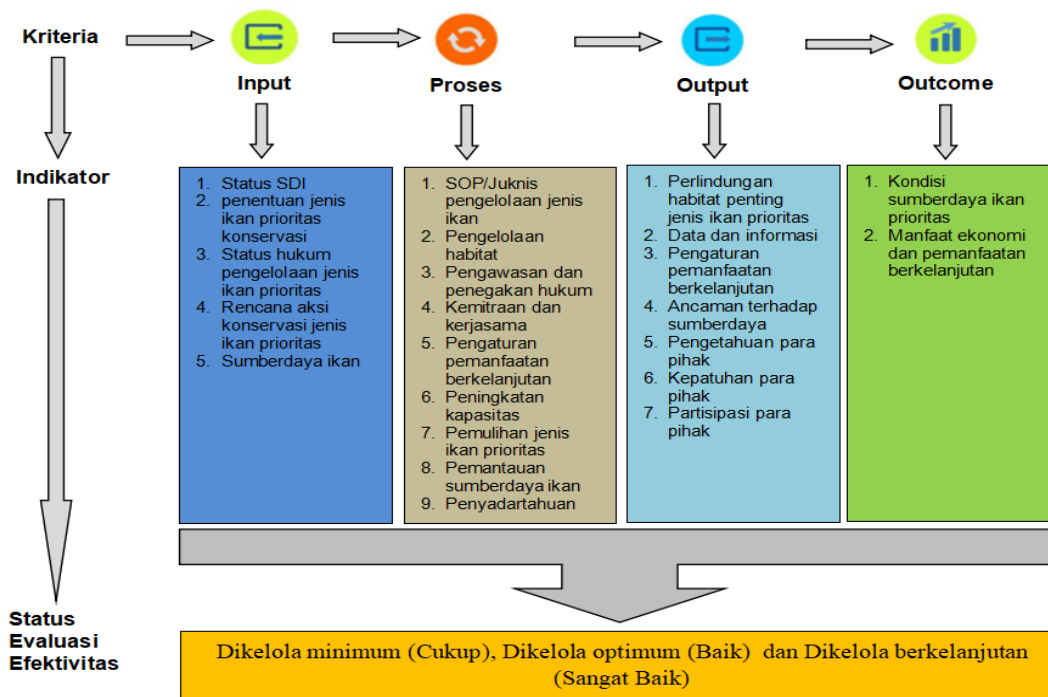
Aspek penilaian efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan terancam punah meliputi 4 kriteria/tahapan input/perencanaan, proses/implementasi, output/luaran dan outcome/dampak. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/ diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, output dan outcome. Adapun kriteria dan indikator yang diukur dalam evaluasi ini adalah:

1. *Kriteria input*: Status sumber daya ikan, penentuan jenis ikan prioritas konservasi, status hukum pengelolaan jenis ikan ikan prioritas, rencana aksi konservasi jenis ikan prioritas, dan sumber daya manusia
2. *Kriteria proses*: SOP/Petunjuk teknis pengelolaan jenis ikan, pengelolaan habitat, pengawasan dan penegakan hukum, kemitraan dan kerja sama, pengaturan pemanfaatan berkelanjutan, peningkatan kapasitas, pemulihan jenis ikan prioritas, pemantauan sumber daya ikan, dan penyadartahuan
3. *Kriteria output*: Perlindungan habitat penting jenis ikan prioritas, data dan informasi, pengaturan pemanfaatan berkelanjutan, ancaman terhadap sumber daya, pengetahuan para pihak, kepatuhan para pihak dan partisipasi para pihak



4. *Kriteria outcome*: Kondisi sumber daya ikan prioritas dan manfaat ekonomi dari pemanfaatan berkelanjutan

Hasil penilaian dari keseluruhan indikator tersebut akan menjadi bahan untuk evaluasi efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*. Secara lebih detail, kerangka pikir untuk evaluasi tingkat efektivitas pengelolaan dapat dilihat pada gambar di bawah ini

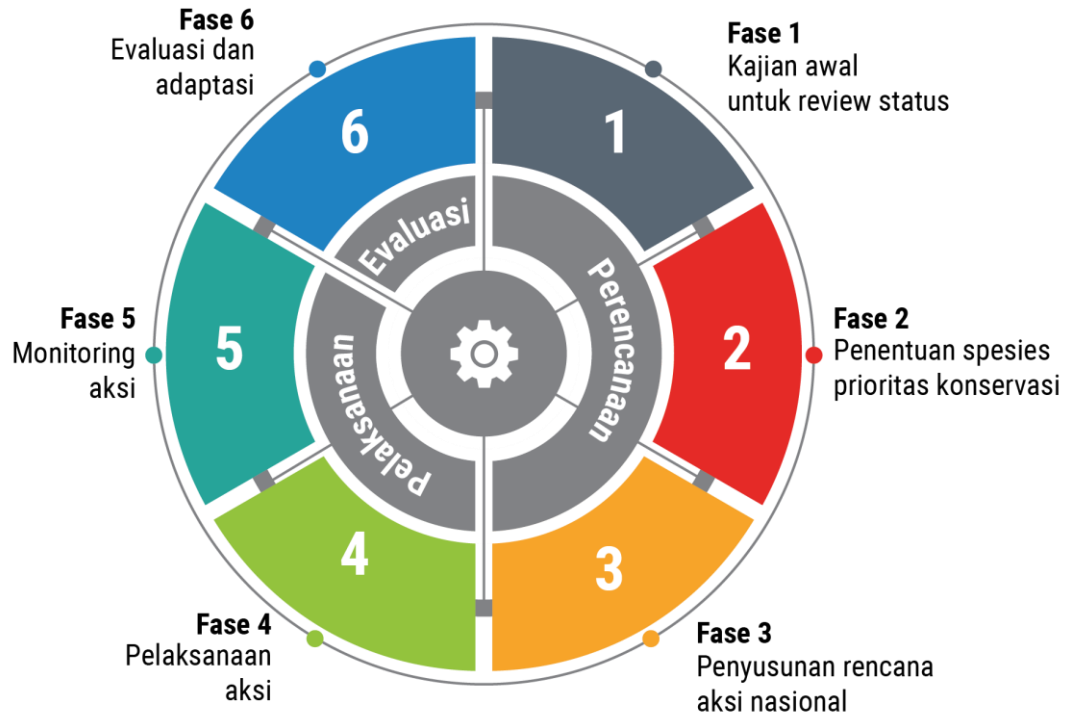


Gambar 1. Kerangka pikir penilaian efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendix *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*

## B. Kerangka Evaluasi

### 2.1. Siklus pengelolaan

Secara umum, siklus konservasi dan pengelolaan jenis ikan terancam punah dibagi menjadi 3 fase, yaitu: fase perencanaan, pelaksanaan dan fase evaluasi (gambar 2). Tahapan perencanaan meliputi pengumpulan informasi sebagai kajian awal status jenis ikan terancam, penentuan spesies ikan terancam punah yang menjadi prioritas konservasi dan pengelolaan, dan penyusunan rencana aksi nasional. Tahapan pelaksanaan meliputi pelaksanaan strategi konservasi & pengelolaan dan monitoring aksi. Tahapan evaluasi meliputi evaluasi dan adaptasi. Secara skematis, siklus pengelolaan jenis ikan di Indonesia dalam evaluasi efektivitas jenis ikan dilindungi dan terancam punah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Siklus pengelolaan dalam evaluasi efektivitas jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*

Dalam pengelolaan jenis ikan dilindungi dan terancam punah, keberhasilannya diukur berdasarkan tingkat efektivitas pengelolaan yang telah dilakukan terhadap jenis ikan prioritas untuk dikelola. Penilaian terhadap spesies tersebut dilakukan pada setiap kriteria, mulai dari kriteria input (perencanaan), proses (implementasi), output (luaran) maupun outcome (dampak). Proses penilaian dilakukan dengan menggunakan perangkat berupa daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan masing-masing indikator pada setiap kriteria atau tahapan pengelolaan yang menggambarkan siklus pengelolaan jenis ikan di Indonesia.

Kriteria input menggambarkan indikator-indikator yang dibutuhkan melakukan menjalankan pengelolaan jenis ikan pada tahap perencanaan. Indikator-indikator yang terdapat pada kriteria input meliputi status sumber daya ikan, penentuan jenis prioritas, status hukum konservasi dan pengelolaan jenis ikan prioritas, rencana aksi konservasi dan pengelolaan, sumber daya manusia.

Kriteria proses menggambarkan upaya yang dilakukan dalam menjalankan pengelolaan melalui pelaksanaan perencanaan yang telah dilakukan. Indikator yang terdapat pada kriteria ini antara lain: petunjuk teknis pengelolaan jenis ikan, pengelolaan habitat, pengawasan dan penegakan hukum, kemitraan dan

kerja sama, pengaturan pemanfaatan berkelanjutan , peningkatan kapasitas, pemulihan jenis ikan, pemantauan sumber daya ikan, dan penyadartahuan.

Kriteria output menggambarkan luaran dari proses pengelolaan yang telah dilakukan. Indikator yang terdapat pada kriteria ini antara lain: perlindungan habitat penting jenis ikan, data dan informasi, pengaturan pemanfaatan berkelanjutan, ancaman terhadap sumber daya ikan, pengetahuan para pihak, kepatuhan para pihak, dan partisipasi para pihak.

Kriteria outcome menggambarkan merupakan dampak akhir yang ingin dicapai dari pengelolaan yang telah dilakukan. Dampak ini diukur dengan indikator kondisi sumber daya ikan dan manfaat ekonomi yang dari pemanfaatan berkelanjutan.

## 2.2. Kerangka Penilaian

Setiap kriteria dan indikator memiliki bobot tergantung dari tingkat urgensinya masing - masing. Berdasarkan diskusi dengan para pakar, jika salah satu kriteria dan indikator memiliki memiliki pengaruh atau nilai penting yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, maka bobotnya akan diberi nilai lebih tinggi. Daftar pembobotan kriteria dan indikator secara lengkap tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Bobot setiap kriteria dan indikator penilaian

No	Kriteria/Tahapan	Bobot	Indikator	Bobot
1	Input/Perencanaan	20	Status sumber daya ikan	15
			Penentuan jenis ikan prioritas konservasi	20
			Status hukum pengelolaan jenis ikan ikan prioritas	25
			Rencana aksi konservasi jenis ikan prioritas	20
			Sumber daya manusia	20
2	Proses/Implementasi	25	SOP/Petunjuk teknis pengelolaan jenis ikan	10
			Pengelolaan habitat	15
			Pengawasan dan penegakan hukum	15
			Kemitraan dan kerja sama	5
			Pengaturan pemanfaatan berkelanjutan	15
			Peningkatan kapasitas	10
			Pemulihan jenis ikan prioritas	5
			Pemantauan sumber daya ikan	10
Penyadartahuan	15			
3	Out put/Luaran	35	Perlindungan habitat penting jenis ikan prioritas	15
			Data dan informasi	15
			Pengaturan pemanfaatan berkelanjutan	20
			Ancaman terhadap sumber daya	20
			Pengetahuan para pihak	10
			Kepatuhan para pihak	10
4	Out come/Dampak	20	Kondisi sumber daya ikan prioritas	60
			Manfaat ekonomi dari pemanfaatan berkelanjutan	40

Penilaian tingkat efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, dirancang dengan menggunakan

pertanyaan-pertanyaan pada indikator (Tabel 2). Jawaban dari setiap pertanyaan wajib disertai dengan alat verifikasi yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Alat verifikasi tersebut menjadi dasar validitas jawaban yang telah disepakati. Setiap pertanyaan memiliki tingkatan jawaban yang berbeda-beda tergantung dari kondisi di lapangan.

Tabel 2. Jumlah indikator, bobot dan pertanyaan pada setiap kriteria

Tahapan/Kriteria	Jumlah Indikator	Jumlah Pertanyaan
Input	5	17
Proses	9	14
Output	7	7
Outcome	2	4
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>42</b>

Setiap pertanyaan kemudian diberi nilai berdasarkan jawaban – jawaban. Nilai dari jawaban berkisar dari 0 – 3, yang kemudian dikalikan dengan bobot pada indikator tersebut. Nilai dari setiap pertanyaan pada semua indikator kemudian dijumlahkan (Ni). Selain itu dihitung juga nilai maksimal dari dari setiap pertanyaan, kemudian nilai maksimal tersebut dijumlahkan (Nmax). Perbandingan antara jumlah semua pertanyaan jumlah nilai maksimal dengan dalam satu kriteria, dapat menggambarkan persentase capaian dari pengelolaan (Nk). Untuk mendapatkan nilai akhir efektivitas nilai NK kemudian dikali dengan bobot nilai (dalam persentasi) kemudian dijumlahkan.

Tabel 3. Perhitungan nilai akhir evaluasi efektivitas pengelolaan jenis ikan

Tahapan/Kriteria	Ni	Nmax	Nk (%)	Bk	Nak(%)
Input	.....	.....	.....	0,20	.....
Proses	.....	.....	.....	0,35	.....
Output	.....	.....	.....	0,25	.....
Outcome	.....	.....	.....	0,20	.....
<b>Nilai akhir E-Panji</b>					.....

**Keterangan:**

- Nilai indikator (Ni) : Hasil penjumlahan nilai pada setiap indikator
- Nilai maksimum (Nmax) : total nilai maksimal dari seluruh pertanyaan

Nilai kriteria (Nk)	: $(N_i / N_{max}) \times 100\%$
Bobot kriteria (Bk)	: nilai bobot yang diberikan untuk setiap kriteria
Nilai akhir kriteria (Nak)	: $N_k \times B_k$
Nilai akhir E-Panji	: penjumlahan Nak

Nilai akhir evaluasi pada panduan ini kemudian diklasifikasikan ke dalam 3 level pengelolaan yaitu cukup (dikelola minimum), baik (dikelola optimum) dan sangat baik (dikelola berkelanjutan). Pada level pengelolaan minimum, upaya pengelolaan sudah mulai diinisiasi, namun belum semua program dapat diimplementasikan. Pada level pengelolaan optimum, upaya pengelolaan direncanakan dan diimplementasikan tetapi tidak semua luaran dan dampak pengelolaan tercapai dan pada level pengelolaan berkelanjutan, dampak pengelolaan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, seperti kondisi sumberdaya yang stabil dan/atau ekonomi masyarakat mulai membaik (Tabel 4).

Tabel 4. Status evaluasi efektivitas pengelolaan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*

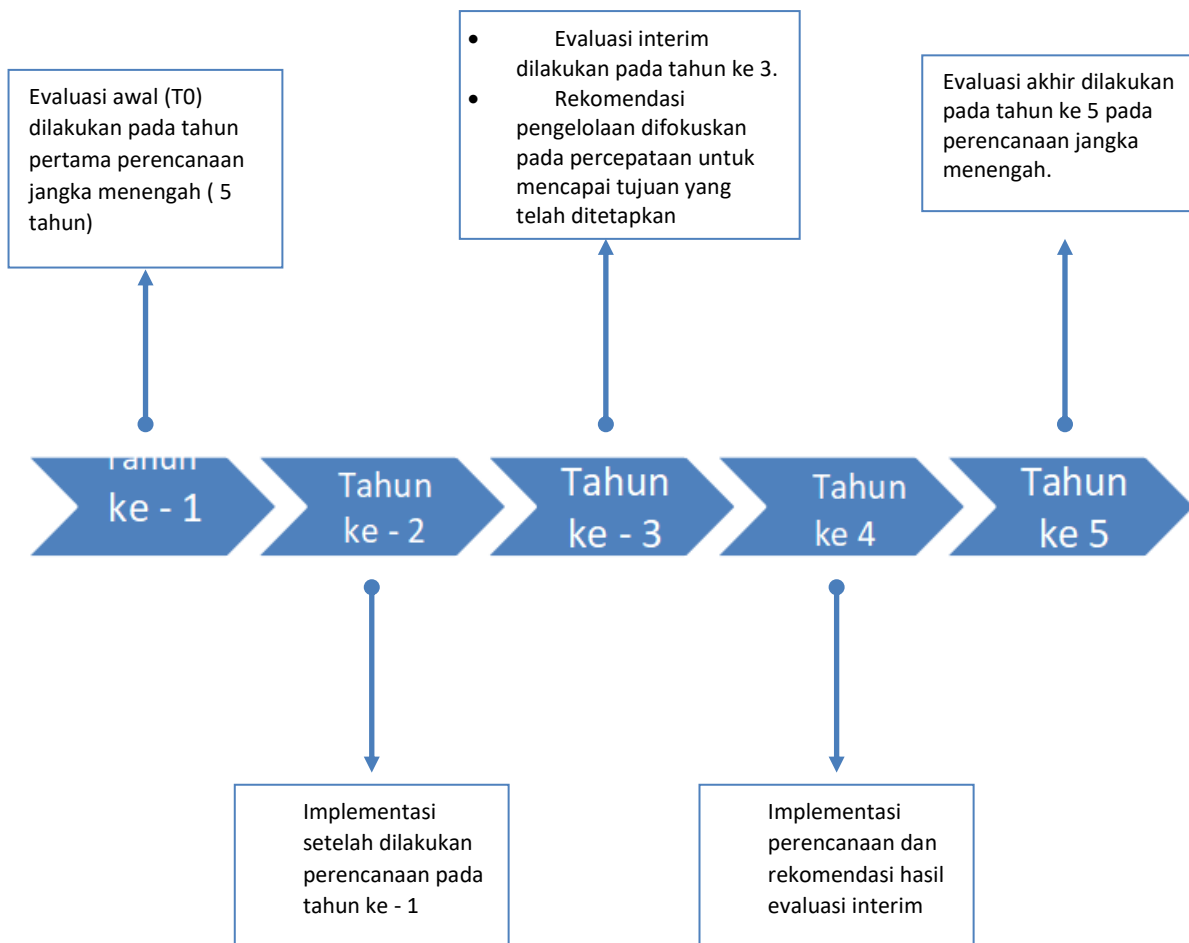
Nilai Akhir E-Panji	Level		Keterangan
<45%	Cukup	Dikelola Minimum	Upaya pengelolaan sudah mulai diinisiasi, namun belum semua program dapat diimplementasikan
>45 – 70%	Baik	Dikelola Optimum	Upaya pengelolaan direncanakan dan diimplementasikan tetapi tidak semua luaran dan dampak pengelolaan tercapai
>70%	Sangat Baik	Dikelola Berkelanjutan	Dampak pengelolaan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, seperti kondisi sumberdaya yang stabil dan/atau ekonomi masyarakat mulai membaik

### C. Tata Cara Evaluasi

#### 3.1. Siklus evaluasi pengelolaan jenis ikan

Evaluasi efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, bertujuan untuk mengetahui tingkat

keberhasilan pengelolaan jenis ikan yang sudah dilakukan dalam mencapai tujuan pengelolaannya. Evaluasi tersebut dilakukan setidaknya 3 kali sesuai dengan siklus pengelolaan selama 5 tahun, yaitu evaluasi awal, evaluasi jangka menengah, dan evaluasi akhir. Evaluasi awal dilakukan pada tahun pertama pada siklus rencana pengelolaan jangka menengah sebagai nilai awal. Evaluasi pada jangka menengah dilakukan untuk efektivitas pada pertengahan siklus. Dilakukan pada tahun 3 pada siklus pengelolaan jangka menengah. Evaluasi akhir dilakukan pada akhir siklus pengelolaan tepatnya pada tahun ke 5.



Gambar 3. Alur evaluasi efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, dalam siklus perencanaan jangka menengah

### 3.2. Tahapan evaluasi efektifitas pengelolaan jenis ikan

Tata cara evaluasi efektivitas pengelolaan jenis ikan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

#### a. Pembentukan tim penilai

Tim penilai efektivitas pengelolaan jenis ikan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang berlaku

selama satu tahun. Susunan keanggotaan Tim Penilai terdiri dari Direktur KKHL sebagai penanggung jawab, serta anggota lainnya yang berasal dari unit kerja dan instansi terkait, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat.

b. Penyusunan rencana kerja penilaian

Tim penilai yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menyusun rencana kerja penilaian. Rencana kerja penilaian memuat informasi jumlah spesies yang akan dinilai, kegiatan koordinasi, kegiatan pengumpulan dokumen, kegiatan penilaian dan verifikasi, pelaporan penilaian untuk setiap spesies, serta tata waktu pelaksanaan untuk semua kegiatan.

c. Koordinasi dan persiapan evaluasi efektifitas pengelolaan jenis ikan.

Tim penilai akan berkoordinasi dengan para pihak dari lingkup kementerian, lingkup direktoran jenderal ruang laut, lembaga penelitian, universitas dan mitra pemerintah untuk rencana evaluasi efektifitas pengelolaan jenis ikan. Pada tahap ini tim penilai akan berkoordinasi untuk menentukan waktu pelaksanaan, kebutuhan dokumen yang pelengkap dan alat/bukti verifikasi penilaian setiap spesies. Dokumen yang disiapkan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Dokumen alat verifikasi evaluasi efektifitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan terancam punah.

No.	Kriteria	Contoh alat verifikasi jawaban pertanyaan
1	Input	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan kajian LIPI/buku status sumber daya/informasi lainnya yang memuat informasi jenis ikan prioritas. Ada 6 komponen yang dibahas meliputi biologi, ekologi, sebaran, sosial, pemanfaatan dan ancaman</li><li>2. Permen/perdirjen tentang spesies prioritas</li><li>3. SK pembentukan tim penentuan spesies prioritas</li><li>4. Laporan kegiatan pembahasan dengan para pihak tentang penentuan jenis ikan prioritas.</li></ol> Laporan konsultasi publik tentang penentuan jenis ikan

		<p>prioritas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Permen/kepmen/Perdirjen tentang perlindungan penuh, perlindungan terbatas dan pengaturan pemanfaatan seperti kuota untuk jenis ikan yang tercantum dalam Apendiks 2 CITES.</li> <li>6. Dokumen kajian akademik usulan perlindungan jenis ikan/ Usulan pengajuan pemanfaatan untuk jenis ikan yang tercantum dalam Apendiks 2 CITES.</li> <li>7. Analisis kebijakan usulan perlindungan jenis ikan</li> <li>8. Berita acara konsultasi publik status perlindungan/Berita acara pembahasan kuota pemanfaatan untuk jenis ikan yang tercantum dalam Apendiks 2 CITES.</li> <li>9. Rekomendasi ilmiah dari otoritas keilmuan status perlindungan/ rekomendasi kuota pemanfaatan</li> <li>10. Permen/perdirjen tentang Rencana Aksi Nasional (RAN)</li> <li>11. Laporan evaluasi implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN)</li> <li>12. SK/surat tugas penempatan pegawai</li> <li>13. Sertifikat kompetensi pegawai (SK3 atau SKKNI)</li> </ol>
2	Proses	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP pengelolaan jenis ikan seperti monitoring populasi, SOP Pemanfaatan jenis prioritas, SOP pemanfaatan jenis untuk non ekstraktif, SOP monitoring perdagangan, SOP pemulihan, SOP introduksi, SOP rehabilitasi sumberdaya, dan SOP pelepasliaran ke alam.</li> <li>2. Laporan kajian pemetaan habitat penting jenis ikan</li> <li>3. Laporan kunjungan lapangan untuk verifikasi habitat penting jenis ikan.</li> <li>4. Laporan kegiatan/laporan pengawasan di perairan atau pendataan atau lokasi prioritas.</li> <li>5. Laporan verifikasi/laporan pemberian rekomendasi/laporan saji dalam negeri atau luar negeri</li> <li>6. Dokumen perjanjian kerjsa sama (PKS) dalam lingkup Ditjen PRL.</li> <li>7. Laporan tahunan mitra.</li> <li>8. Kegiatan bimbingan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan jenis ikan.</li> <li>9. Kegiatan sertifikasi kompetensi internal KKP (SK3)</li> <li>10. Kegiatan sertifikasi Kompetensi Nasional (SKKNI)</li> <li>11. Laporan kegiatan pemulihan jenis ikan</li> <li>12. Laporan kegiatan pelepasliaran ke alam jenis ikan</li> <li>13. Informasi pendataan jenis ikan (data dan laporan)</li> <li>14. Laporan kegiatan penyadartahuan.</li> </ol>



3	Output	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepmen/Perdes/kesepakatan masyarakat terkait perlindungan habitat penting</li><li>2. Data pendataan/Laporan pendataan SDI</li><li>3. Laporan pemanfaatan jenis ikan secara ekstraktif maupun non ekstraktif</li><li>4. Data laporan yang mencantumkan kondisi ancaman terhadap sumberdaya ikan</li><li>5. Laporan survey pemahaman dan pengetahuan</li><li>6. SK pembentukan forum/pokja konservasi jenis ikan</li></ol>
4	Outcome	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan/data dan informasi hasil pendataan yang memuat informasi status sumberdaya (populasi) dari waktu ke waktu</li><li>2. Data dan informasi survei sosial ekonomi yang memuat tentang dampak pengelolaan terhadap sosial ekonomi masyarakat (informasi pendapatan masyarakat, lapangan kerja baru)</li></ol>

d. Penilaian efektivitas.

Penilaian dilakukan dengan lokakarya/workshop/FGD/pertemuan lainnya dengan mengundang para pihak terkait untuk membahas tentang pengelolaan jenis ikan. Tim Penilai akan memandu jalannya penilaian efektivitas dan diskusi. Peserta yang hadir memiliki hak yang sama dalam memberikan penilaian dengan disertai bukti dan alat verifikasi. Nilai yang dicatat merupakan nilai yang disepakati oleh semua peserta yang hadir. Setelah dilakukan proses penilaian dan verifikasi dengan cara mengisi setiap pertanyaan pada lembar penilaian, proses selanjutnya adalah menyusun hasil evaluasi dan rekomendasi. Para peserta yang hadir menyusun rekomendasi pengelolaan untuk masa yang akan datang. Hasil penilaian dan rekomendasi pengelolaan akan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi yang ditanda tangani oleh seluruh pihak/pemangku kepentingan yang hadir. Format Berita Acara disusun sebagaimana lampiran 3.

e. Verifikasi dan review akhir oleh tim penilai.

Setelah melakukan lokakarya evaluasi dengan para pihak untuk melakukan penilaian, tim penilai akan membahas hasil penilaian dan rekomendasi pada rapat internal tim. Hal tersebut dilakukan untuk melakukan verifikasi atas penilaian dan review akhir dengan mengecek alat bukti. Hasil dari verifikasi dan review tersebut kemudian akan menjadi bahan dalam pembuatan laporan.

f. Pelaporan

Tim penilai menyusun laporan hasil evaluasi efektivitas pengelolaan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*. Laporan tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebulan setelah dilakukan penilaian.

g. Status evaluasi efektivitas secara resmi.

Laporan yang dibuat oleh tim penilaian menjadi dasar bagi direktorat jenderal pengelolaan ruang laut untuk menetapkan status efektivitas pengelolaan jenis secara resmi.

#### D. Pelaporan

##### 4.1. Penyusunan laporan

Data dan hasil penilaian efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* akan disimpan dalam bentuk file elektronik dan salinan kertas oleh tim penilai. Data berkas (file) elektronik disimpan dalam folder yang terstruktur dan diberi nama dengan format yang disepakati untuk memudahkan pencarian dan melakukan perbandingan antartahun. Pemberian nama berkas yang diusulkan yaitu: \*nama jenis ikan yang dievaluasi\_tipe evaluasi efektivitas\_bulan tahun evaluasi\*

Contoh : Sidat\_Evaluasi efektivitas awal\_Juni 2021.xls

Sidat\_Evaluasi efektivitas interim\_Juli 2023.xls

Sidat\_Evaluasi efektivitas akhir\_Juni2025.xls

Data evaluasi efektivitas yang telah dikumpulkan dan disimpan kemudian dianalisis sebagai bahan penyusunan laporan. Analisis data didasarkan pada 4 (empat) kriteria penilaian, yaitu kriteria input, kriteria proses, kriteria output, dan kriteria outcome. Setiap kriteria mempunyai skor maksimum 100 dengan penilaian didasarkan pada indikator yang telah ditentukan. Dengan mengukur setiap indikator pada masing-masing kriteria tersebut, pengelola dapat melihat capaian dalam pengelolaan yang telah dilakukan.

Analisis hasil evaluasi disajikan dalam bentuk infografis (diagram batang, grafik, dan sebagainya) dan narasi/deskripsi. Apabila jenis ikan telah dilakukan penilaian dan evaluasi selama lebih dari 1 (satu) kali, maka analisis ditambahkan perbandingan penilaian tahun sebelumnya. Perbandingan penilaian antarwaktu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi perubahan efektivitas pengelolaan jenis ikan. Informasi tersebut digunakan sebagai tolok ukur dalam melihat kelebihan ataupun kelemahan dalam pengelolaan yang dilakukan saat ini atau tahun-tahun sebelumnya. Selain

analisis terhadap perubahan nilai kriteria, analisis dapat dilakukan terhadap indikator-indikator yang telah dicapai dan tidak tercapai pada masing-masing kriteria.

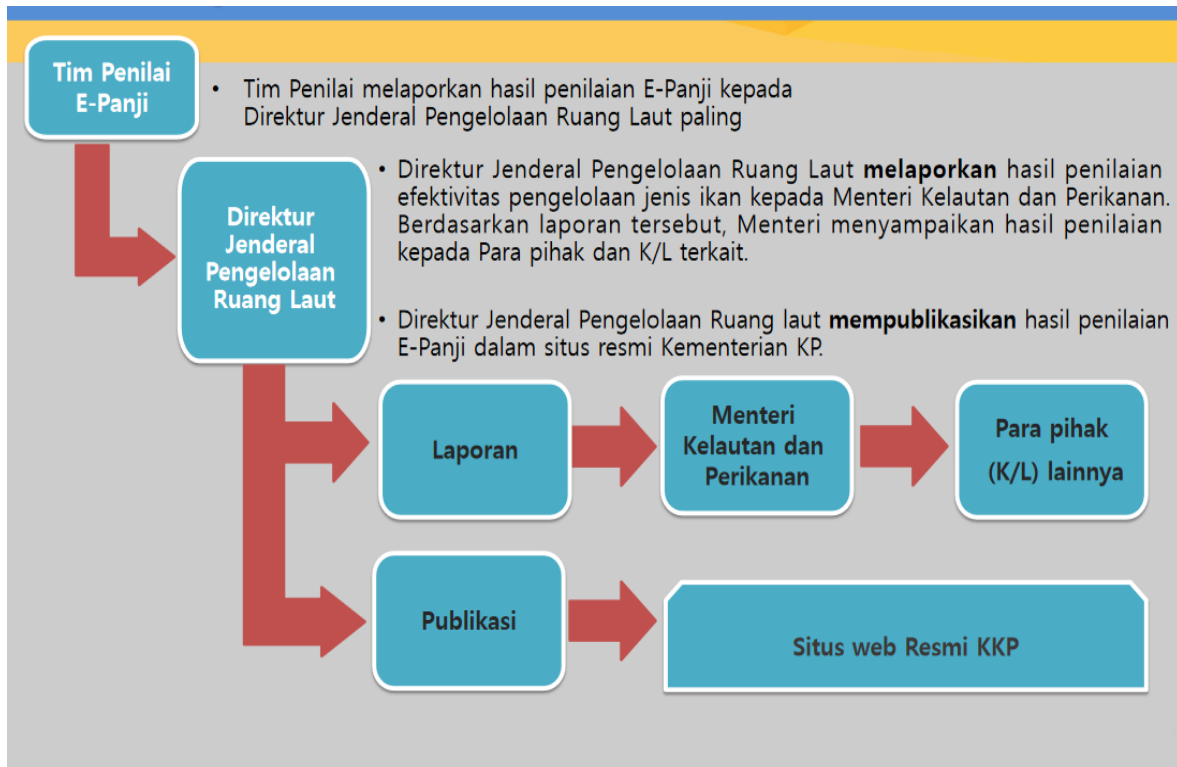
Berdasarkan hasil analisis, dapat disusun rekomendasi berupa usulan program/kegiatan bagi pengelola kawasan konservasi pada tahun/atau periode berikutnya. Kesimpulan dalam pelaporan setidaknya memuat skor capaian efektivitas pengelolaan pada masing-masing kriteria, perubahan efektivitas antarwaktu, dan rekomendasi usulan program/kegiatan pada tahun dan/atau periode berikutnya. Laporan Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* disusun dengan ketentuan isi sebagai berikut:

- judul;
- kata pengantar;
- abstrak atau rangkuman (maksimal 1 halaman);
- daftar isi;
- uraian tentang tim penilai;
- pendahuluan atau latar belakang;
- tujuan pengelolaan, sumber daya ikan. bisa dilihat dari dokumen rencana aksi;
- hasil evaluasi: berupa infografis penilaian efektivitas pengelolaan jenis ikan (perbandingan antarwaktu);
- pembahasan: berupa analisis hasil evaluasi dan perbandingan penilaian antarwaktu;
- kesimpulan dan rekomendasi; dan
- lampiran berupa informasi umum jenis ikan (Lampiran 1), lembar efektivitas (Lampiran 2), Perhitungan Nilai Indeks efektivitas (Lampiran 3), Berita Acara (Lampiran 4), infografis, dan dokumen pendukung penilaian (5) dan dokumentasi kegiatan penilaian dengan para pihak (6).

#### 4.2 Penyampaian Laporan

Tim penilai efektivitas akan melaporkan hasil evaluasi efektivitas pengelolaan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* sesuai format laporan pada Subbab 4.1. kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut paling lambat satu bulan setelah penilaian dengan para pihak dilakukan. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

melaporkan hasil penilaian kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan laporan tersebut, Menteri KP menyampaikan hasil penilaian kepada Gubernur dan K/L terkait lainnya. Secara paralel, hasil penilaian diinformasikan kepada publik melalui situs web resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Diagram proses penyampaian laporan penilaian efektivitas pengelolaan jenis ikan disajikan sebagaimana pada Gambar 4.



Gambar 4. Diagram Proses Penyampaian Laporan Efektivitas pengelolaan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*.

#### E. Penutup

Pedoman umum Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* ini merupakan bagian dari siklus pengelolaan dalam upaya mencapai target pengelolaan jenis ikan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat yang hidupnya tergantung dari keberadaan jenis ikan tersebut.



F. Lembar penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*

KRITERIA : INPUT							
INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	SKOR	BOBOT	JUMLAH	HASIL PENILAIAN	TOTAL NILAI
Status sumber daya ikan	Apakah ada kajian awal yang lengkap meliputi aspek biologi, ekologi, sebaran, sosial, pemanfaatan, ancaman dan kebijakan pada tingkat global (IUCN dan CITES) dan nasional?	Tidak ada kajian	0	15	0		
		Ada kajian awal tetapi hanya sebagian kecil aspek terpenuhi (Kurang dari 50% aspek dilakukan)	1	15	15		
		Ada kajian awal dengan sebagian besar aspek terpenuhi (sama dengan lebih dari 50% aspek dilakukan)	2	15	30		
		Ada kajian awal yang secara lengkap meliputi aspek semua biologi, ekologi, sebaran, sosial, pemanfaatan dan ancaman	3	15	45		

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	SKOR	BOBOT	JUMLAH	HASIL PENILAIAN	TOTAL NILAI
Penentuan jenis ikan prioritas konservasi	Apakah sumber daya ikan tersebut masuk dalam jenis prioritas konservasi dan pengelolaan KKP dalam 5 tahun mendatang	Tidak masuk	0	20	0		
		Masuk	1	20	20		
	Apakah proses penentuan status prioritas melibatkan para pihak?	Tidak melibatkan para pihak dan tidak semua proses dijalankan	0	20	0		
		Melibatkan para pihak penting tetapi prosesnya tidak semua dilakukan	1	20	20		
		Kurang melibatkan para pihak tetapi prosesnya sesuai dengan peraturan perundangan	2	20	40		
		Melibatkan para pihak penting dengan proses sesuai dengan peraturan perundangan	3	20	60		
Status hukum pengelolaan dan konservasi jenis ikan nasional	Apakah jenis prioritas yang dimaksud sudah memiliki status hukum konservasi dan pengelolaan nasional?	Tidak ada status pengelolaan atau konservasi	0	25	0		
		Status jenis ikan sedang dalam proses pengajuan	1	25	25		
		Ada dan Sudah ditetapkan secara resmi	2	25	50		
	Jika pertanyaan sebelumnya sudah lengkap. Proses penentuan status hukum pengelolaan dan konservasi jenis (pertanyaan di bawah ada pilihan antara A dengan B						

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	SKOR	BOBOT	JUMLAH	HASIL PENILAIAN	TOTAL NILAI
	A. Jika jenis dilindungi penuh atau terbatas	Semua tahapan tidak dilaksanakan sesuai dengan Permen 35	0	25	0		
		Adanya usulan inisitif dan analisis kebijakan untuk perlindungan jenis ikan, tetapi tidak ada konsultasi publik dan tidak memiliki rekomendasi ilmiah	1	25	25		
		Adanya usulan inisitif dan analisis kebijakan untuk perlindungan jenis ikan, dilakukan konsultasi publik tetapi tidak memiliki rekomendasi ilmiah	2	25	50		
		Adanya usulan inisitif dan analisis kebijakan untuk perlindungan jenis ikan, dilakukan konsultasi publik dan memiliki rekomendasi ilmiah	3	25	75		
	B. Jika jenis diatur pemanfaatannya (Apendiks II CITES)	Tidak sesuai dengan tahapan pengaturan pemanfaatan seperti diatur dalam permen 61 tahun 2018	0	25	0		
		Adanya usulan pengajuan batas pemanfaatan oleh pelaku usaha, tetapi tidak dibahas bersama para pihak dan tidak mendapat rekomendasi ilmiah dari otoritas pengelola	1	25	25		
		Adanya usulan pengajuan batas pemanfaatan oleh pelaku usaha kemudian dibahas bersama para pihak tetapi tidak mendapat rekomendasi ilmiah dari otoritas pengelola	2	25	50		
		Adanya usulan pengajuan batas pemanfaatan oleh pelaku usaha kemudian dibahas bersama para pihak dan mendapat rekomendasi ilmiah dari otoritas pengelola	3	25	75		



INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	SKOR	BOBOT	JUMLAH	HASIL PENILAIAN	TOTAL NILAI
	C. Jika jenis diatur pemanfaatannya (Apendiks II CITES)	Tidak sesuai dengan tahapan pengaturan pemanfaatan seperti diatur dalam permen 61 tahun 2018	0	25	0		
		Adanya usulan pengajuan batas pemanfaatan oleh pelaku usaha, tetapi tidak dibahas bersama para pihak dan tidak mendapat rekomendasi ilmiah dari otoritas pengelola	1	25	25		
		Adanya usulan pengajuan batas pemanfaatan oleh pelaku usaha kemudian dibahas bersama para pihak tetapi tidak mendapat rekomendasi ilmiah dari otoritas pengelola	2	25	50		
		Adanya usulan pengajuan batas pemanfaatan oleh pelaku usaha kemudian dibahas bersama para pihak dan mendapat rekomendasi ilmiah dari otoritas pengelola	3	25	75		
Rencana aksi konservasi jenis ikan prioritas	Apakah jenis tersebut memiliki dokumen rencana aksi konservasi?	Belum ada dokumen rencana aksi	0	20	0		
		Dokumen rencana aksi masih dalam bentuk draft	1	20	20		
		Dokumen rencana aksi ada dan sudah ditetapkan aturan dan perundangan	2	20	40		
	Bagaimana pelaksanaan rencana aksi nasional konservasi	Pelaksanaan program pada rencana aksi nasional konservasi kurang dari 10%	0	20	0		
		Pelaksanaan program pada rencana aksi nasional konservasi antara 10 - 30%	1	20	20		
		Pelaksanaan program pada rencana aksi nasional konservasi antara 30% - 50%	2	20	40		
		Pelaksanaan program pada rencana aksi nasional konservasi lebih dari 50%	3	20	60		

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	SKOR	BOBOT	JUMLAH	HASIL PENILAIAN	TOTAL NILAI
Sumber daya manusia	Apakah ada sumber daya manusia dalam pengelolaan jenis ikan prioritas yang memiliki fungsi sebagai berikut:						
	a. Pemantauan sumber daya ikan	belum ada	0	20	0		
		Sudah ada	1	20	20		
	b. Administrasi perkantoran	belum ada	0	20	0		
		Sudah ada	1	20	20		
	c. Pelayanan publik (perizinan)	belum ada	0	20	0		
		Sudah ada	1	20	20		
	d. Pengawasan	belum ada	0	20	0		
		Sudah ada	1	20	20		
	e. Pendampingan masyarakat/ penyuluh	belum ada	0	20	0		
Sudah ada		1	20	20			

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	SKOR	BOBOT	JUMLAH	HASIL PENILAIAN	TOTAL NILAI
	Apakah sumber daya manusia tersebut memiliki kompetensi dalam bidang berikut:						
	a. Pemantauan sumber daya ikan	belum ada	0	20	0		
		Sudah ada	1	20	20		
	b. Administrasi perkantoran	belum ada	0	20	0		
		Sudah ada	1	20	20		
	c. Pelayanan publik (perizinan)	belum ada	0	20	0		
		Sudah ada	1	20	20		
	d. Pengawasan	belum ada	0	20	0		
		Sudah ada	1	20	20		
	e. Pendampingan masyarakat/ penyuluh	belum ada	0	20	0		
		Sudah ada	1	20	20		

**KRITERIA: PROSES**

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	SKOR	BOBOT	JUMLAH	HASIL PENILAIAN	TOTAL NILAI
SOP/Petunjuk teknis pengelolaan jenis ikan	Apakah ada SOP pengelolaan sumber daya ikan prioritas?	Tidak memiliki SOP dalam menjalankan pengelolaan jenis ikan prioritas	0	10	0		
		Memiliki sebagian SOP untuk menjalankan pengelolaan jenis ikan prioritas	1	10	10		
		Memiliki seluruh SOP untuk menjalankan pengelolaan jenis ikan prioritas	2	10	20		
	Apakah SOP/juknis tersebut diterapkan di lapangan?	SOP tidak diterapkan	0	10	0		
		SOP diterapkan kurang dari 50%	1	10	10		
		SOP diterapkan lebih dari 50%	2	10	20		
Pengelolaan habitat	Apakah ada pemetaan mengenai lokasi - lokasi habitat penting bagi jenis ikan prioritas ?	Belum ada pemetaan lokasi habitat penting bagi jenis ikan prioritas	0	15	0		
		Lokasi habitat penting dipetakan dari hasil kajian literatur	1	15	15		
		Lokasi habitat penting dipetakan dari hasil kajian literatur dan verifikasi lapangan	2	15	30		
		Lokasi habitat penting telah terpetakan secara resmi	3	15	45		

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	SKOR	BOBOT	JUMLAH	HASIL PENILAIAN	TOTAL NILAI
Pengawasan dan penegakan hukum	Apakah ada kegiatan pengawasan berkala terhadap pemanfaatan jenis ikan prioritas?	Kegiatan pengawasan tidak dilakukan baik pada saat pengambilan/pendaratan, perdagangan domestik, dan perdagangan internasional	0	15	0		
	A. Pengambilan/pendaratan/ Area penangkapan	Pengawasan pengambilan/pemanfaatan jenis ikan dari alam dilakukan minimal satu kali setiap tiga bulan pada lokasi prioritas atau pada masa larangan	1	15	15		
		Pengawasan pengambilan jenis ikan dari alam dilakukan minimal satu kali setiap bulan atau masa larangan pada lokasi prioritas	2	15	30		
		Pengawasan pengambilan jenis ikan dari alam dilakukan lebih dari satu kali setiap bulan atau masa larangan pada lokasi prioritas	3	15	45		
	B. Perdagangan domestik	Pengawasan perdagangan domestik dilakukan pada 20-50% pintu keluar utama	1	15	15		
		Pengawasan perdagangan domestik dilakukan pada pintu minimal 50% keluar utama barang yang keluar	2	15	30		
		Pengawasan perdagangan domestik dilakukan pada seluruh pintu keluar utama barang yang keluar	3	15	45		

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	SKOR	BOBOT	JUMLAH	HASIL PENILAIAN	TOTAL NILAI
	C. Perdagangan internasional	Pengawasan perdagangan internasional dilakukan minimal 20-50% pada pintu keluar utama barang yang keluar	1	15	15		
		Pengawasan perdagangan internasional dilakukan minimal 50% pada pintu keluar utama dari barang yang keluar	2	15	30		
		Pengawasan perdagangan internasional dilakukan pada seluruh pintu keluar utama setiap barang yang keluar	3	15	45		
Kemitraan dan kerjasama	Apakah ada kerja sama antar masyarakat dengan pemerintah dalam pengelolaan jenis ikan prioritas dan melibatkan para pihak?	Tidak ada kemitraan dengan para pihak berkaitan dengan pengelolaan jenis ikan di Indonesia	0	5	0		
		Kurang dari 50% mitra yang memiliki perjanjian kerja sama memiliki program pengelolaan jenis ikan.	1	5	5		
		50% - 75% mitra yang memiliki perjanjian kerja sama memiliki program pengelolaan jenis ikan.	2	5	10		
		Lebih dari 75% mitra yang memiliki perjanjian kerja sama memiliki program pengelolaan jenis ikan.	3	5	15		
	Apakah program kemitraan dan kerja sama dengan mitra diimplementasikan?	Jumlah program yang dikerjasamakan dengan mitra kurang 20% diimplementasikan	0	5	0		
		Jumlah program yang dikerja samakan dengan mitra diimplementasikan pada skala <20- 50%	1	5	5		
		Jumlah program yang dikerja samakan dengan mitra diimplementasikan pada 50-75%.	2	5	10		
		Jumlah program yang dikerja samakan dengan mitra diimplementasikan pada lebih dari 75%	3	5	15		

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	SKOR	BOBOT	JUMLAH	HASIL PENILAIAN	TOTAL NILAI
Pengaturan pemanfaatan berkelanjutan	Apakah ada pengaturan pemanfaatan jenis ikan prioritas baik ekstraktif maupun non-ekstraktif untuk menjamin keberlanjutan?	Tidak ada mekanisme pengaturan pemanfaatan baik penangkapan maupun perdagangan	0	15	0		
		Ada mekanisme pengaturan pemanfaatan baik penangkapan maupun perdagangan tetapi tidak diterapkan di lapangan	1	15	15		
		Ada mekanisme pengaturan pemanfaatan baik penangkapan maupun perdagangan dan diterapkan di lapangan	2	15	30		
Peningkatan kapasitas	Apakah ada kegiatan peningkatan kapasitas SDM ?	Tidak ada kegiatan peningkatan kapasitas kebutuhan pengelolaan jenis	0	10	0		
		Ada kegiatan peningkatan kapasitas tetapi masih bersifat insidental (tidak terstruktur)	1	10	10		
		Ada kegiatan peningkatan kapasitas sesuai dengan kebutuhan pengelolaan secara terstruktur dan sistematis tetapi tidak sertifikasi kompetensi	2	10	20		
		Ada kegiatan peningkatan kapasitas sesuai dengan kebutuhan pengelolaan secara terstruktur dan sistematis (kurikulum, berjenjang dan terjadwal dan memiliki sertifikasi kompetensi KKP)	3	10	30		
		Ada kegiatan peningkatan kapasitas sesuai dengan kebutuhan pengelolaan secara terstruktur dan sistematis (kurikulum, berjenjang dan terjadwal dan memiliki sertifikasi kompetensi Nasional)	4	10	40		

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	SKOR	BOBOT	JUMLAH	HASIL PENILAIAN	TOTAL NILAI
Pemulihan jenis ikan prioritas	Ada upaya pemulihan kondisi sumber daya ikan dan habitatnya dengan melalui proses insitu atau ex situ						
	1. Jenis ikan yang secara keilmuan bisa dilakukan pemulihan populasi	Tidak ada upaya pemulihan kondisi sumber daya	0	5	0		
		Ada upaya pemulihan tetapi masih pada skala uji coba skala ex situ (laboratorium)	1	5	5		
		Ada upaya pemulihan tetapi masih pada skala uji coba di lapangan di lokasi percontohan	2	5	10		
		Ada upaya pemulihan di lapangan di lokasi - lokasi priortitas atau pemulihan habitat	3	5	15		
		Ada upaya pemulihan jenis ikan di lokasi prioritas dan pemulihan habitat jenis ikan untuk memastikan jenis pemulihan alami	4	5	20		
	2. Jenis ikan yang tidak memungkinkan dilakukan pengayaan populasi (seperti mamalia laut, hiu dll) dan fokus jenis yang tertangkap tidak sengaja atau terdampar	Tidak Ada upaya pelepasliaran jenis ikan ke alam	0	5	0		
		Ada upaya pelepasliaran tetapi tidak terstruktur	1	5	5		
		Ada upaya pelepasliaran dan terstruktur	2	5	10		



INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	SKOR	BOBOT	JUMLAH	HASIL PENILAIAN	TOTAL NILAI
Pemantauan sumber daya ikan	Apakah pemantauan sumber daya ikan dilakukan telah dilakukan secara berkala pada lokasi - lokasi prioritas?	Tidak dilakukan pemantauan sumber daya ikan prioritas (baik T0 maupun T1, T2 dan seterusnya)	0	10	0		
		Telah dilakukan pemantauan sumber daya ikan prioritas tetapi tidak berkala dan tidak merepresentasikan lokasi prioritas (T0 saja sementara tidak ada T1)	1	10	10		
		Telah dilakukan pemantauan sumber daya ikan prioritas secara berkala dan tidak merepresentasikan lokasi prioritas (T0, T1, T2 dan seterusnya ; kurang dari 50% dari lokasi prioritas)	2	10	20		
		Telah dilakukan pemantauan sumber daya ikan prioritas secara berkala dan merepresentasikan lokasi prioritas (T0, T1, T2 dan seterusnya ; lebih 50% dari lokasi prioritas)	3	10	30		
Penyadartahuan	Apakah ada kegiatan penyadartahuan	Tidak ada kegiatan penyadartahuan pada skala nasional dan lokasi prioritas	0	15	0		
		Ada kegiatan penyadartahuan tetapi hanya dilakukan sebagian (Hanya dilakukan pada skala nasional tetapi tidak pada lokasi prioritas dan sebaliknya)	1	15	15		
		Ada kegiatan penyadartahuan pada skala nasional dan lokasi prioritas	2	15	30		

**KRITERIA: OUTPUT**

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	SKOR	BOBOT	JUMLAH	HASIL PENILAIAN	TOTAL NILAI
Perlindungan habitat penting jenis ikan prioritas	Apakah habitat penting jenis ikan prioritas sudah ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi (KKP, DPL, kawasan adat, dan kawasan yang disepakati masyarakat)	Tidak ada	0	15	0		
		Ada, tetapi kurang dari 20% dari lokasi prioritas yang telah dipetakan	1	15	15		
		Ada, 20-50% dari luas lokasi prioritas yang telah dipetakan	2	15	30		
		Ada, lebih 50% dari luas lokasi prioritas yang telah dipetakan	3	15	45		
Data dan informasi	Apakah data dan informasi mengenai spesies prioritas tersedia secara lengkap dan berkelanjutan dan disimpan melalui sistem data base?	Tidak ada	0	15	0		
		Ada, tetapi tidak semua lokasi - lokasi prioritas terwakili (kurang dari 50%) dan tidak berkelanjutan (time series)	1	15	15		
		Ada, mewakili lokasi - lokasi prioritas (diatas 50%) tetapi tidak berkelanjutan (time series), atau berkelanjutan (time series) tetapi tidak semua lokasi - lokasi prioritas (kurang dari 50%)	2	15	30		
		Ada. Semua lokasi - lokasi penting terwakili (> 50%) dan data berkelanjutan (time series)	3	15	45		

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	SKOR	BOBOT	JUMLAH	HASIL PENILAIAN	TOTAL NILAI
Pengaturan pemanfaatan berkelanjutan	Apakah pemanfaatan jenis ikan ekstraktif dan non ekstraktif sesuai dengan kaidah keberlanjutan? (In situ atau di alam). Perdirjen xxx tentang pemanfaatan jasa lingkungan	Ada pemanfaatan non ekstraktif tetapi tidak ada yang memenuhi kaidah keberlanjutan yang diatur dalam aturan perundangan	0	20	0		
		Ada pemanfaatan non ekstraktif tetapi kurang dari 50% yang memenuhi kaidah keberlanjutan yang diatur dalam aturan perundangan	1	20	20		
		Ada pemanfaatan non ekstraktif dari 50 - 75% yang memenuhi kaidah keberlanjutan yang diatur dalam aturan perundangan	2	20	40		
		Ada pemanfaatan non ekstraktif dari > 75% yang memenuhi kaidah keberlanjutan yang diatur dalam aturan perundangan	3	20	60		
Ancaman terhadap sumber daya	Apakah ancaman yang telah teridentifikasi berkurang	Ancaman terhadap jenis ikan meningkat dibandingkan dengan data baseline T0. dilihat dari lokasi prioritas	0	20	0		
		Ancaman terhadap jenis ikan sama dibandingkan dengan data baseline T0	1	20	20		
		Ancaman terhadap jenis ikan menurun dibandingkan data baseline tetapi tidak signifikan	2	20	40		
		Ancaman terhadap jenis ikan menurun dibandingkan data baseline secara signifikan	3	20	60		

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	SKOR	BOBOT	JUMLAH	HASIL PENILAIAN	TOTAL NILAI
Pengetahuan para pihak	Apakah ada peningkatan pengetahuan	Pengetahuan para pihak masih sama atau menurun dibandingkan dengan kondisi baseline	0	10	0		
		Pengatahuan para pihak meningkat tapi tidak signifikan dibandingkan dengan kondisi baseline	1	10	10		
		Pengatahuan para pihak meningkat signifikan dibandingkan dengan kondisi baseline	2	10	20		
Kepatuhan terhadap aturan	Apakah ada kepatuhan para pihak terhadap aturan perlindungan atau pemanfaatan jenis ikan	Jumlah pelanggaran meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya	0	10	0		
		Jumlah pelanggaran tetap dibandingkan dengan tahun sebelumnya	1	10	10		
		Jumlah pelanggaran menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya	2	10	20		
Partisipasi para pihak dalam konservasi jenis	Bagaimana tingkat partisipasi para pihak dalam konservasi jenis ikan	Tidak memiliki forum komunikasi atau kelompok kerja pengelolaan jenis ikan.	0	10	0		
		Ada forum komunikasi atau kelompok kerja pengelolaan jenis ikan tetapi tidak aktif	1	10	10		
		Ada forum komunikasi atau kelompok kerja pengelolaan jenis ikan dan aktif	2	10	20		

**KRITERIA: OUTCOME**

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	SKOR	BOBOT	JUMLAH	HASIL PENILAIAN	TOTAL NILAI
Kondisi sumber daya ikan prioritas	Bagaimana kondisi sumber daya ikan prioritas pada lokasi prioritas?	Kondisi sumber daya ikan prioritas menurun secara signifikan dibandingkan data dasar (T0)	0	60	0		
		Kondisi sumber daya ikan stabil dibandingkan T0 (turun atau naik, namun tidak signifikan)	1	60	60		
		Kondisi sumber daya ikan meningkat secara signifikan dibandingkan data dasar (T0)	2	60	120		
Manfaat ekonomi dari pemanfaatan berkelanjutan	Apakah pengelolaan sumber daya ikan prioritas berdampak terhadap penambahan pelaku usaha atau pekerja baru pada sektor yang sama.	Tidak ada penambahan pelaku usaha baru pada sektor yang sama	0	40	0		
		Ada penambahan pelaku usaha baru pada sektor yang sama tetapi tidak signifikan	1	40	40		
		Ada penambahan pelaku usaha baru pada sektor yang sama secara signifikan	2	40	80		
	Apakah pengelolaan sumber daya ikan prioritas berdampak terhadap penambahan lapangan kerja baru ? (seperti sektor pariwisata, perikanan, perdagangan dan lainnya?)	Tidak ada penambahan lapangan kerja baru dari selain sektor utama	0	40	0		
		Ada penambahan 1 lapangan kerja baru dari sektor lainnya	1	40	40		
		Ada penambahan 2 atau lebih lapangan kerja baru dari sub sektor lainnya	2	40	80		
	Apakah pengelolaan sumber daya ikan prioritas berdampak terhadap penambahan pendapatan terhadap masyarakat?	Tidak ada perubahan pendapatan terhadap masyarakat pengelolaan jenis ikan	0	40	0		
		Ada penambahan pendapatan terhadap masyarakat pengelolaan jenis ikan yang mendapatkan lapangan kerja baru tetapi tidak signifikan	1	40	40		
		Ada penambahan pendapatan terhadap masyarakat pengelolaan jenis ikan yang mendapatkan lapangan kerja baru dan signifikan	2	40	80		

- G. Daftar pertanyaan dan dokumen alat verifikasi evaluasi efektivitas pengelolaan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*

**KRITERIA: INPUT**

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	ALAT VERIFIKASI
Status sumber daya ikan	Apakah ada kajian awal yang lengkap meliputi aspek biologi, ekologi, sebaran, sosial, pemanfaatan, ancaman dan kebijakan pada tingkat global (IUCN dan CITES) dan nasional?	Tidak ada kajian	Laporan kajian LIPI/buku status sumber daya/informasi lainnya yang memuat informasi jenis ikan prioritas. Ada 6 komponen yang dibahas meliputi biologi, ekologi, sebaran, sosial, pemanfaatan dan ancaman
		Ada kajian awal tetapi hanya sebagian kecil aspek terpenuhi (Kurang dari 50% aspek dilakukan)	
		Ada kajian awal dengan sebagian besar aspek terpenuhi (sama dengan lebih dari 50% aspek dilakukan)	
		Ada kajian awal yang secara lengkap meliputi aspek semua biologi, ekologi, sebaran, sosial, pemanfaatan dan ancaman	
Penentuan jenis ikan prioritas konservasi	Apakah sumber daya ikan tersebut masuk dalam jenis prioritas konservasi dan pengelolaan KKP dalam 5 tahun mendatang	Tidak masuk	Permen/perdirjen/dokumen resmi lainnya tentang spesies prioritas konservasi
		Masuk	

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	ALAT VERIFIKASI
	Apakah proses penentuan status prioritas melibatkan para pihak?	<p>Tidak melibatkan para pihak dan tidak semua proses dijalankan</p> <p>Melibatkan para pihak penting tetapi prosesnya tidak semua dilakukan</p> <p>Kurang melibatkan para pihak tetapi prosesnya sesuai dengan peraturan perundangan</p> <p>Melibatkan para pihak penting dengan proses sesuai dengan peraturan perundangan</p>	<p>Laporan kegiatan pembahasan dengan para pihak tentang penentuan jenis ikan prioritas.</p> <p>ATAU</p> <p>Laporan konsultasi publik tentang penentuan jenis ikan prioritas.</p>
Status pengelolaan dan konservasi jenis ikan nasional	<p>Apakah jenis prioritas yang dimaksud sudah memiliki status konservasi dan pengelolaan nasional?</p> <p>Jika pertanyaan sebelumnya sudah lengkap. Proses penentuan status pengelolaan dan konservasi jenis (pertanyaan di bawah ada pilihan antara A dengan B</p>	<p>Tidak ada status pengelolaan atau konservasi</p> <p>Status jenis ikan sedang dalam proses pengajuan</p> <p>Ada dan Sudah ditetapkan secara resmi</p>	<p>Permen/kepmen/Perdirjen tentang perlindungan penuh, perlindungan terbatas dan pengaturan pemanfaatan seperti kuota untuk jenis ikan yang tercantum dalam Apendiks 2 CITES.</p>

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	ALAT VERIFIKASI
	A. Jika jenis dilindungi penuh atau terbatas	<p>Semua tahapan tidak dilaksanakan sesuai dengan Permen 35</p> <p>Adanya usulan inisitif dan analisis kebijakan untuk perlindungan jenis ikan, tetapi tidak ada konsultasi publik dan tidak memiliki rekomendasi ilmiah</p> <p>Adanya usulan inisitif dan analisis kebijakan untuk perlindungan jenis ikan, dilakukan konsultasi publik tetapi tidak memiliki rekomendasi ilmiah</p> <p>Adanya usulan inisitif dan analisis kebijakan untuk perlindungan jenis ikan, dilakukan konsultasi publik dan memiliki rekomendasi ilmiah</p>	
	B. Jika jenis diatur pemanfaatannya (Apendiks II CITES)	<p>Tidak sesuai dengan tahapan pengaturan pemanfaatan seperti diatur dalam permen 61 tahun 2018</p> <p>Adanya usulan pengajuan batas pemanfaatan oleh pelaku usaha, tetapi tidak dibahas bersama para pihak dan tidak mendapat rekomendasi ilmiah dari otoritas pengelola</p> <p>Adanya usulan pengajuan batas pemanfaatan oleh pelaku usaha kemudian dibahas bersama para pihak tetapi tidak mendapat rekomendasi ilmiah dari otoritas pengelola</p> <p>Adanya usulan pengajuan batas pemanfaatan oleh pelaku usaha kemudian dibahas bersama para pihak dan mendapat rekomendasi ilmiah dari otoritas pengelola</p>	Dokumen kajian akademik usulan perlindungan jenis ikan/ Usulan pengajuan pemanfaatan untuk jenis ikan yang tercantum dalam Apendiks 2 CITES
Rencana aksi konservasi jenis ikan prioritas	Apakah jenis tersebut memiliki dokumen rencana aksi konservasi?	<p>Belum ada dokumen rencana aksi</p> <p>Dokumen rencanana aksi masih dalam bentuk draft</p> <p>Dokumen rencana aksi ada dan sudah ditetapkan aturan dan perundangan</p>	Permen/perdirjen/dokumen resmi lainnya tentang Rencana Aksi Nasional (RAN)



INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	ALAT VERIFIKASI
	Bagaimana pelaksanaan rencana aksi nasional konservasi	Pelaksanaan program pada rencana aksi nasional konservasi kurang dari 10% Pelaksanaan program pada rencana aksi nasional konservasi antara 10 - 30% Pelaksanaan program pada rencana aksi nasional konservasi antara 30% - 50% Pelaksanaan program pada rencana aksi nasional konservasi lebih dari 50%	Laporan/matrik/dokumen lainnya tentang evaluasi implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) konservasi
Sumber daya manusia	Apakah ada sumber daya manusia dalam pengelolaan jenis ikan prioritas yang memiliki fungsi sebagai berikut:		SK/surat tugas penempatan pegawai atau daftar pegawai sesuai kualifikasi pendidikan/kompetensi pegawai dari instansi berwenang
	a. Pemantauan sumber daya ikan	belum ada Sudah ada	
	b. Administrasi perkantoran	belum ada Sudah ada	
	c. Pelayanan publik (perizinan)	belum ada Sudah ada	
	d. Pengawasan	belum ada Sudah ada	
	e. Pendampingan masyarakat/ penyuluh	belum ada Sudah ada	

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	ALAT VERIFIKASI
	Apakah sumber daya manusia tersebut memiliki kompetensi dalam bidang berikut:		
	a. Pemantauan sumber daya ikan	belum ada Sudah ada	Sertifikat kompetensi pegawai (SK3 atau SKKNI) atau pelatihan/bimtek pegawai
	b. Administrasi perkantoran	belum ada	
		Sudah ada	
	c. Pelayanan publik (perizinan)	belum ada	
		Sudah ada	
	d. Pengawasan	belum ada	
		Sudah ada	
	e. Pendampingan masyarakat/ penyuluh	belum ada	
		Sudah ada	

**KRITERIA: PROSES**

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	ALAT VERIFIKASI
SOP/Petunjuk teknis pengelolaan jenis ikan	Apakah ada SOP pengelolaan sumber daya ikan prioritas?	Tidak memiliki SOP dalam menjalankan pengelolaan jenis ikan prioritas	SOP pengelolaan jenis ikan seperti monitoring populasi, SOP Pemanfaatan jenis prioritas, SOP pemanfaatan jenis untuk non ekstraktif, SOP monitoring perdagangan, SOP pemulihan, SOP introduksi, SOP rehabilitasi sumberdaya, dan SOP pelepasliaran ke alam
		Memiliki sebagian SOP untuk menjalankan pengelolaan jenis ikan prioritas	
		Memiliki seluruh SOP untuk menjalankan pengelolaan jenis ikan prioritas	
	Apakah SOP/juknis tersebut diterapkan di lapangan?	SOP tidak diterapkan	
SOP diterapkan kurang dari 50%			
SOP diterapkan lebih dari 50%			
Pengelolaan habitat	Apakah ada pemetaan mengenai lokasi - lokasi habitat penting bagi jenis ikan prioritas ?	Belum ada pemetaan lokasi habitat penting bagi jenis ikan prioritas	Laporan kajian pemetaan habitat penting jenis ikan  ATAU  Laporan kunjungan lapangan untuk verifikasi habitat penting jenis ikan
		Lokasi habitat penting dipetakan dari hasil kajian literatur	
		Lokasi habitat penting dipetakan dari hasil kajian literatur dan verifikasi lapangan	
		Lokasi habitat penting telah terpetakan secara resmi	

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	ALAT VERIFIKASI
Pengawasan dan penegakan hukum	Apakah ada kegiatan pengawasan berkala terhadap pemanfaatan jenis ikan prioritas?	Kegiatan pengawasan dilakukan baik pada saat pengambilan/pendaratan, perdagangan domestik, dan perdagangan internasional	
	A. Pengambilan/pendaratan/ Area penangkapan	Pengawasan pengambilan/pemanfaatan jenis ikan dari alam dilakukan minimal satu kali setiap tiga bulan pada lokasi prioritas atau pada masa larangan	Laporan kegiatan/laporan pengawasan di perairan atau penangkapan/pendaratan di lokasi prioritas.
		Pengawasan pengambilan jenis ikan dari alam dilakukan minimal satu kali setiap bulan atau masa larangan pada lokasi prioritas	
		Pengawasan pengambilan jenis ikan dari alam dilakukan lebih dari satu kali setiap bulan atau masa larangan pada lokasi prioritas	
	B. Perdagangan domestik	Pengawasan perdagangan domestik dilakukan pada 20-50% pintu keluar utama	Laporan kegiatan/laporan pengawasan/data informasi peredaran jenis di pintu lalu lintas karantina atau pelayanan ijin/ekomendasi di UPT PRL
Pengawasan perdagangan domestik dilakukan pada pintu minimal 50% keluar utama barang yang keluar			
Pengawasan perdagangan domestik dilakukan pada seluruh pintu keluar utama barang yang keluar			

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	ALAT VERIFIKASI
	C. Perdagangan internasional	Pengawasan perdagangan internasional dilakukan minimal 20-50% pada pintu keluar utama barang yang keluar Pengawasan perdagangan internasional dilakukan minimal 50% pada pintu keluar utama dari barang yang keluar Pengawasan perdagangan internasional dilakukan pada seluruh pintu keluar utama setiap barang yang keluar	Laporan kegiatan/laporan pengawasan/data informasi peredaran jenis di pintu lalu lintas karantina atau pelayanan ijin/rekomendasi di UPT PRL.
Kemitraan dan kerjasama	Apakah ada kerja sama antar masyarakat dengan pemerintah dalam pengelolaan jenis ikan prioritas dan melibatkan para pihak?	Tidak ada kemitraan dengan para pihak berkaitan dengan pengelolaan jenis ikan di Indonesia	Dokumen perjanjian kerja sama (PKS) dalam lingkup Ditjen PRL
		Kurang dari 50% mitra yang memiliki perjanjian kerja sama memiliki program pengelolaan jenis ikan. 50% - 75% mitra yang memiliki perjanjian kerja sama memiliki program pengelolaan jenis ikan. Lebih dari 75% mitra yang memiliki perjanjian kerja sama memiliki program pengelolaan jenis ikan.	
	Apakah program kemitraan dan kerja sama dengan mitra diimplementasikan?	Jumlah program yang dikerjasamakan dengan mitra kurang 20% diimplementasikan Jumlah program yang dikerja samakan dengan mitra diimplementasikan pada skala <20- 50% Jumlah program yang dikerja samakan dengan mitra diimplementasikan pada 50-75%. Jumlah program yang dikerja samakan dengan mitra diimplementasikan pada lebih dari 75%	Laporan tahunan mitra

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	ALAT VERIFIKASI
Pengaturan pemanfaatan berkelanjutan	Apakah ada pengaturan pemanfaatan jenis ikan prioritas baik ekstraktif maupun non-ekstraktif untuk menjamin keberlanjutan?	Tidak ada mekanisme pengaturan pemanfaatan baik penangkapan maupun perdagangan	Laporan pemanfaatan jenis ikan secara ekstraktif maupun non ekstraktif
		Ada mekanisme pengaturan pemanfaatan baik penangkapan maupun perdagangan tetapi tidak diterapkan di lapangan	
		Ada mekanisme pengaturan pemanfaatan baik penangkapan maupun perdagangan dan diterapkan di lapangan	
Peningkatan kapasitas	Apakah ada kegiatan peningkatan kapasitas SDM ?	Tidak ada kegiatan peningkatan kapasitas kebutuhan pengelolaan jenis	Kegiatan bimbingan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan jenis ikan
		Ada kegiatan peningkatan kapasitas tetapi masih bersifat insidental (tidak terstruktur)	
		Ada kegiatan peningkatan kapasitas sesuai dengan kebutuhan pengelolaan secara terstruktur dan sistematis tetapi tidak sertifikasi kompetensi	Kegiatan sertifikasi kompetensi internal KKP (SK3)
		Ada kegiatan peningkatan kapasitas sesuai dengan kebutuhan pengelolaan secara terstruktur dan sistematis (kurikulum, berjenjang dan terjadwal dan memiliki sertifikasi kompetensi KKP)	
Ada kegiatan peningkatan kapasitas sesuai dengan kebutuhan pengelolaan secara terstruktur dan sistematis (kurikulum, berjenjang dan terjadwal dan memiliki sertifikasi kompetensi Nasional)	Kegiatan sertifikasi Kompetensi Nasional (SKKNI)		

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	ALAT VERIFIKASI
Pemulihan jenis ikan prioritas	Ada upaya pemulihan kondisi sumber daya ikan dan habitatnya dengan melalui proses in situ atau ex situ		
	1. Jenis ikan yang secara keilmuan bisa dilakukan pemulihan populasi	<p>Tidak ada upaya pemulihan kondisi sumber daya</p> <p>Ada upaya pemulihan tetapi masih pada skala uji coba skala ex situ (laboratorium)</p> <p>Ada upaya pemulihan tetapi masih pada skala uji coba di lapangan di lokasi percontohan</p> <p>Ada upaya pemulihan di lapangan di lokasi - lokasi priortitas atau pemulihan habitat</p> <p>Ada upaya pemulihan jenis ikan di lokasi prioritas dan pemulihan habitat jenis ikan untuk memastikan jenis pemulihan alami</p>	Laporan kegiatan pemulihan jenis ikan
	2. Jenis ikan yang tidak memungkinkan dilakukan pengayaan populasi (seperti mamalia laut, hiu dll) dan fokus jenis yang tertangkap tidak sengaja atau terdampar	<p>Tidak Ada upaya pelepasliaran jenis ikan ke alam</p> <p>Ada upaya pelepasliaran tetapi tidak terstruktur</p> <p>Ada upaya pelepasliaran dan terstruktur</p>	Laporan kegiatan pelepasliaran ke alam jenis ikan

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	ALAT VERIFIKASI
Pemantauan sumber daya ikan	Apakah pemantauan sumber daya ikan dilakukan telah dilakukan secara berkala pada lokasi - lokasi prioritas?	<p>Tidak dilakukan pemantauan sumber daya ikan prioritas (baik T0 maupun T1, T2 dan seterusnya)</p> <p>Telah dilakukan pemantauan sumber daya ikan prioritas tetapi tidak berkala dan tidak merepresentasikan lokasi prioritas (T0 saja sementara tidak ada T1)</p> <p>Telah dilakukan pemantauan sumber daya ikan prioritas secara berkala dan tidak merepresentasikan lokasi prioritas (T0, T1, T2 dan seterusnya ; kurang dari 50% dari lokasi prioritas)</p> <p>Telah dilakukan pemantauan sumber daya ikan prioritas secara berkala dan merepresentasikan lokasi prioritas (T0, T1, T2 dan seterusnya ; lebih 50% dari lokasi prioritas)</p>	Data pendataan/Laporan pendataan SDI
Penyadartahuan	Apakah ada kegiatan penyadartahuan	<p>Tidak ada kegiatan penyadartahuan pada skala nasional dan lokasi prioritas</p> <p>Ada kegiatan penyadartahuan tetapi hanya dilakukan sebagian (Hanya dilakukan pada skala nasional tetapi tidak pada lokasi prioritas dan sebaliknya)</p> <p>Ada kegiatan penyadartahuan pada skala nasional dan lokasi prioritas</p>	Laporan kegiatan penyadartahuan.



**KRITERIA: OUTPUT**

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	ALAT VERIFIKASI
Perlindungan habitat penting jenis ikan prioritas	Apakah habitat penting jenis ikan prioritas sudah ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi (KKP, DPL, kawasan adat, dan kawasan yang disepakati masyarakat)	Tidak ada	Kepmen/Perdes/kesepakatan masyarakat terkait perlindungan habitat penting
		Ada, tetapi kurang dari 20% dari lokasi prioritas yang telah dipetakan	
		Ada, 20-50% dari luas lokasi prioritas yang telah dipetakan	
		Ada, lebih 50% dari luas lokasi prioritas yang telah dipetakan	
Data dan informasi	Apakah data dan informasi mengenai spesies prioritas tersedia secara lengkap dan berkesinambungan dan disimpan melalui sistem data base?	Tidak ada	Informasi pendataan jenis ikan (data dan laporan)
		Ada, tetapi tidak semua lokasi - lokasi prioritas terwakili (kurang dari 50%) dan tidak berkesinambungan (time series)	
		Ada, mewakili lokasi - lokasi prioritas (diatas 50%) tetapi tidak berkesinambungan (time series), atau berkesinambungan (time series) tetapi tidak semua lokasi - lokasi prioritas (kurang dari 50%)	
		Ada. Semua lokasi - lokasi penting terwakili (> 50%) dan data berkesinambungan (time series)	

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	ALAT VERIFIKASI
Pengaturan pemanfaatan berkelanjutan	Apakah pemanfaatan jenis ikan ekstraktif dan non ekstraktif sesuai dengan kaidah keberlanjutan? (In situ atau di alam). Perdirjen xxx tentang pemanfaatan jasa lingkungan	<p>Ada pemanfaatan non ekstraktif tetapi tidak ada yang memenuhi kaidah keberlanjutan yang diatur dalam aturan perundangan</p> <p>Ada pemanfaatan non ekstraktif tetapi kurang dari 50% yang memenuhi kaidah keberlanjutan yang diatur dalam aturan perundangan</p> <p>Ada pemanfaatan non ekstraktif dari 50 - 75% yang memenuhi kaidah keberlanjutan yang diatur dalam aturan perundangan</p> <p>Ada pemanfaatan non ekstraktif dari &gt; 75% yang memenuhi kaidah keberlanjutan yang diatur dalam aturan perundangan</p>	Laporan pemanfaatan jenis ikan secara ekstraktif maupun non ekstraktif
Ancaman terhadap sumber daya	Apakah ancaman yang telah teridentifikasi berkurang	<p>Ancaman terhadap jenis ikan meningkat dibandingkan dengan data baseline T0. dilihat dari lokasi prioritas</p> <p>Ancaman terhadap jenis ikan sama dibandingkan dengan data baseline T0</p> <p>Ancaman terhadap jenis ikan menurun dibandingkan data baseline tetapi tidak signifikan</p> <p>Ancaman terhadap jenis ikan menurun dibandingkan data baseline secara signifikan</p>	Data laporan yang mencantumkan kondisi ancaman terhadap sumberdaya ikan

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	ALAT VERIFIKASI
Pengetahuan para pihak	Apakah ada peningkatan pengetahuan	Pengetahuan para pihak masih sama atau menurun dibandingkan dengan kondisi baseline	Laporan survey pemahaman dan pengetahuan
		Pengatahuan para pihak meningkat tapi tidak signifikan dibandingkan dengan kondisi baseline	
		Pengatahuan para pihak meningkat signifikan dibandingkan dengan kondisi baseline	
Kepatuhan terhadap aturan	Apakah ada kepatuhan para pihak terhadap aturan perlindungan atau pemanfaatan jenis ikan	Jumlah pelanggaran meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya	Laporan kegiatan penyadartahuan.
		Jumlah pelanggaran tetap dibandingkan dengan tahun sebelumnya	
		Jumlah pelanggaran menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya	
Partisipasi para pihak dalam konservasi jenis	Bagaimana tingkat partisipasi para pihak dalam konservasi jenis ikan	Tidak memiliki forum komunikasi atau kelompok kerja pengelolaan jenis ikan.	SK pembentukan forum/pokja konservasi jenis ikan
		Ada forum komunikasi atau kelompok kerja pengelolaan jenis ikan tetapi tidak aktif	
		Ada forum komunikasi atau kelompok kerja pengelolaan jenis ikan dan aktif	

**KRITERIA: OUTCOME**

INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	ALAT VERIFIKASI
Kondisi sumber daya ikan prioritas	Bagaimana kondisi sumber daya ikan prioritas pada lokasi prioritas?	Kondisi sumber daya ikan prioritas menurun secara signifikan dibandingkan data dasar (T0)	Laporan/data dan informasi hasil pendataan yang memuat informasi status sumberdaya (populasi) dari waktu ke waktu
		Kondisi sumber daya ikan stabil dibandingkan T0 (turun atau naik, namun tidak signifikan)	
		Kondisi sumber daya ikan meningkat secara signifikan dibandingkan data dasar (T0)	
Manfaat ekonomi dari pemanfaatan berkelanjutan	Apakah pengelolaan sumber daya ikan prioritas berdampak terhadap penambahan pelaku usaha atau pekerja baru pada sektor yang sama.	Tidak ada penambahan pelaku usaha baru pada sektor yang sama	Data dan informasi survei sosial ekonomi yang memuat tentang dampak pengelolaan terhadap sosial ekonomi masyarakat (informasi pendapatan masyarakat, lapangan kerja baru)
		Ada penambahan pelaku usaha baru pada sektor yang sama tetapi tidak signifikan	
		Ada penambahan pelaku usaha baru pada sektor yang sama secara signifikan	
	Apakah pengelolaan sumber daya ikan prioritas berdampak terhadap penambahan lapangan kerja baru ? (seperti sektor pariwisata, perikanan, perdagangan dan lainnya?)	Tidak ada penambahan lapangan kerja baru dari selain sektor utama	Data dan informasi survei sosial ekonomi yang memuat tentang dampak pengelolaan terhadap sosial ekonomi masyarakat (informasi pendapatan masyarakat, lapangan kerja baru)
		Ada penambahan 1 lapangan kerja baru dari sektor lainnya	
		Ada penambahan 2 atau lebih lapangan kerja baru dari sub sektor lainnya	
	Apakah pengelolaan sumber daya ikan prioritas berdampak terhadap penambahan pendapatan terhadap masyarakat?	Tidak ada perubahan pendapatan terhadap masyarakat pengelolaan jenis ikan	Data dan informasi survei sosial ekonomi yang memuat tentang dampak pengelolaan terhadap sosial ekonomi masyarakat (informasi pendapatan masyarakat, lapangan kerja baru)
		Ada penambahan pendapatan terhadap masyarakat pengelolaan jenis ikan yang mendapatkan lapangan kerja baru tetapi tidak signifikan	
		Ada penambahan pendapatan terhadap masyarakat pengelolaan jenis ikan yang mendapatkan lapangan kerja baru dan signifikan	

H. Simulasi perhitungan penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan jenis ikan

Hal pertama yang harus diketahui adalah total nilai dari pilihan jawaban pertanyaan dari setiap indikator (Ni) dibagi dengan total nilai dari seluruh pertanyaan (Nmax) dikalikan 100%, maka akan didapatkan nilai indikator (Nk). Sedangkan untuk mendapatkan nilai per kriteria didapatkan dengan menjumlahkan total (Ni) dibagi dengan Total (Nmax) dikalikan 100%.

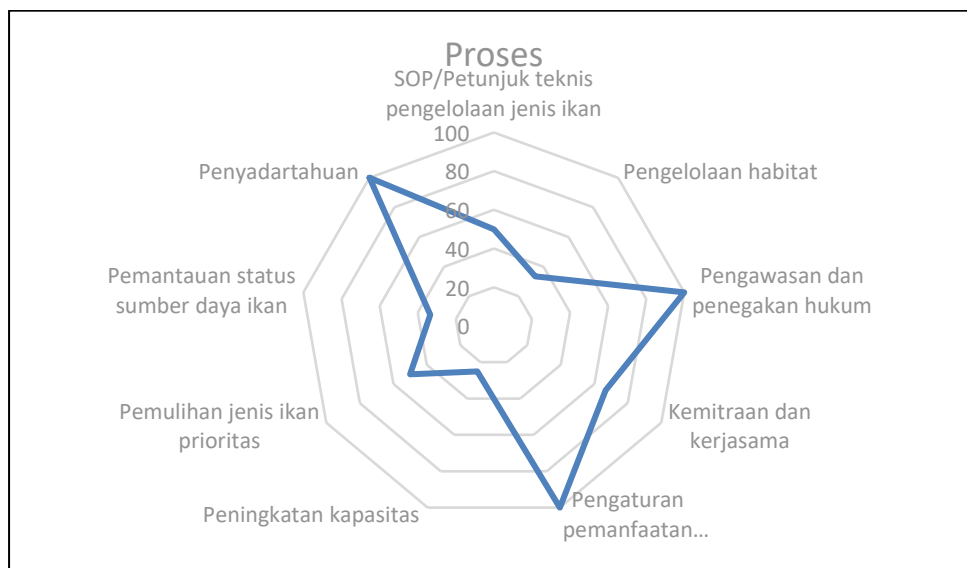
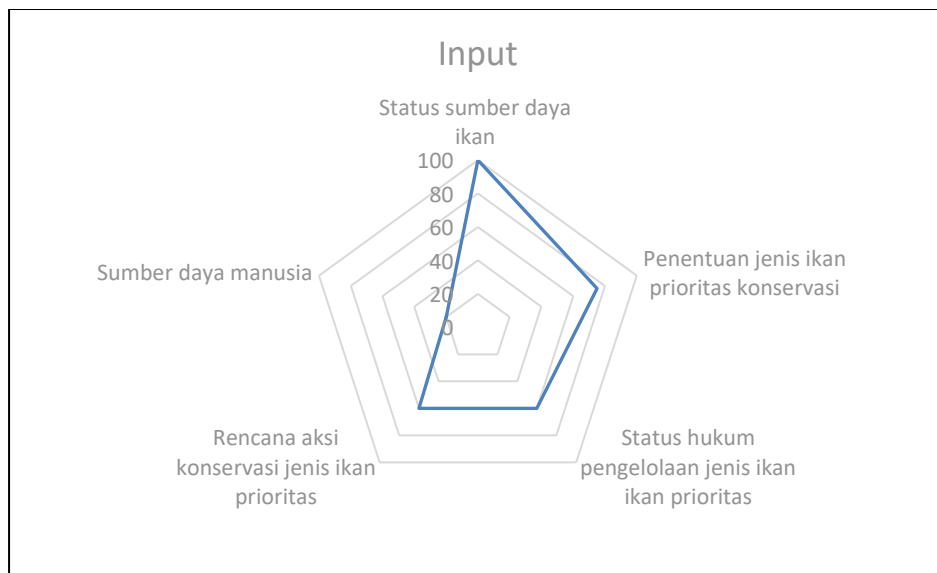
Berikut ini akan disajikan contoh hasil perhitungan penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam *Appendix Convention Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* dengan pilihan jawaban (Ni) yang telah ditentukan sebelumnya secara acak seperti yang tertera pada Tabel 6 di bawah ini

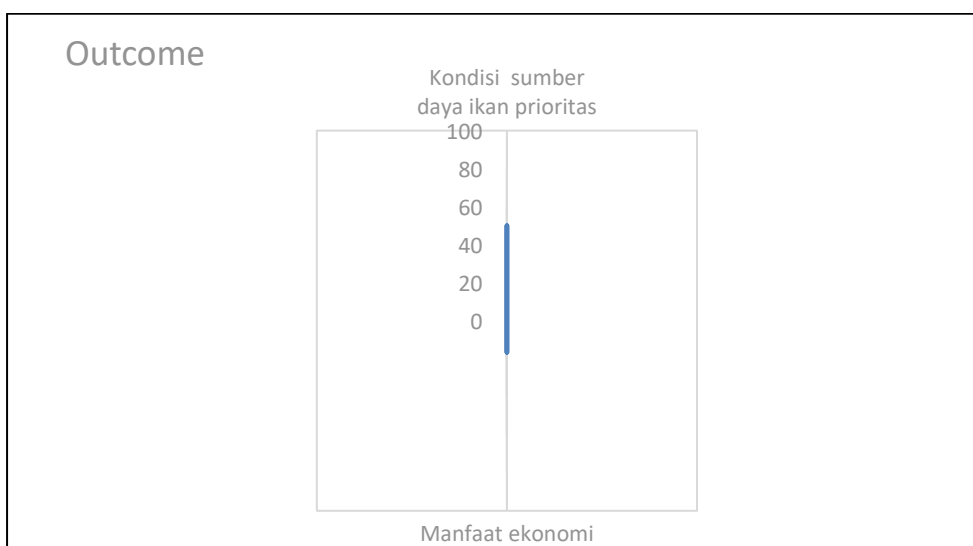
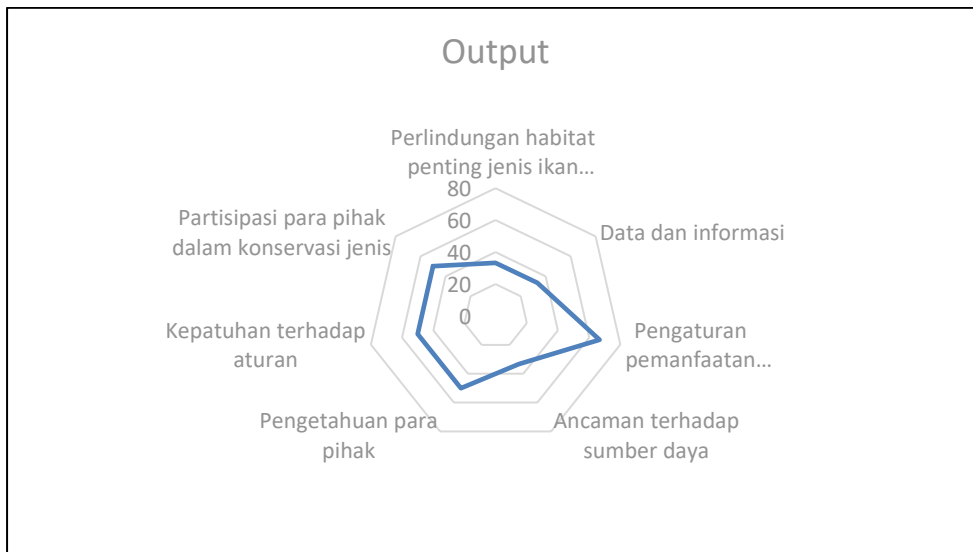
Tabel 6. Contoh hasil Perhitungan Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam *Appendix Convention Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*.

Kriteria	Indikator	Ni	Nmax	Nk
Input	Status SDI	45	45	100
	Penentuan jenis ikan prioritas konservasi	60	80	75
	Status hukum pengelolaan jenis ikan prioritas	75	125	60
	Rencana aksi konservasi jenis ikan prioritas	60	100	60
	Sumberdaya ikan	40	200	20
	<b>Total</b>	<b>280</b>	<b>550</b>	<b>51</b>
	SOP/Juknis pengelolaan jenis ikan	20	40	50
	Pengelolaan habitat	15	45	33
	Pengawasan dan penegakan hukum	135	135	100
	Kemitraandan kerjasama	20	30	67
	Pengaturan pemanfaatan berkelanjutan	30	30	100
	Peningkatan kapasitas	10	40	25
	Pemulihan jenis ikan prioritas	5	10	50
	Pemantauan sumberdaya ikan prioritas	10	30	33
	Penyadartahuan	30	30	100
	<b>Total</b>	<b>275</b>	<b>390</b>	<b>71</b>
	Output	Perlindungan habitat penting jenis ikan prioritas	15	45
Data dan informasi		15	45	33,33
Pengaturan pemanfaatan berkelanjutan		40	60	66,67
Ancaman terhadap		20	60	33,33

Outcome	sumberdaya			
	Pengetahuan para pihak	10	20	50
	Kepatuhan para pihak	10	20	50
	Partisipasi para pihak	10	20	50
	Total	120	270	40
	Kondisi sumber daya ikan prioritas	60	120	50
	Manfaat ekonomi dan pemanfaatan berkelanjutan	40	240	17
	<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>360</b>	<b>27,78</b>

Hasil penilaian untuk tiap-tiap kriteria dari Tabel 6 akan ditampilkan dalam bentuk diagram jaring laba-laba (Gambar 5)





Hasil Perhitungan Nilai Akhir Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam *Appendix Convention Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Nak).

Tabel 7. Nilai akhir efektivitas pengelolaan jenis ikan

No	Kriteria	Nilai Indikator (Ni)	Nmax	Nilai Kriteria (Nk) %	Nilai Akhir EPANJI (%)
1	<b>Input</b>	280	550	50,9	<b>48,92</b>
2	<b>Proses</b>	275	390	70,5	
3	<b>Output</b>	120	270	44,4	
4	<b>Outcome</b>	100	360	27,8	

Berdasarkan nilai EPANJI, maka didapatkan status pengelolaan efektivitas jenis ikan dilindungi dan terancam punah dengan status cukup atau dikelola minimum.

Tabel 8. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam *Appendix Convention Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*

Nilai Akhir Evaluasi	Status	Keterangan	
<45%	Cukup	Dikelola Minimum	Upaya pengelolaan sudah mulai diinisiasi, namun belum semua program dapat diimplementasikan.
>45 – 70%	Baik	Dikelola Optimum	Upaya pengelolaan yang direncanakan dan diimplementasikan tetapi tidak semua luaran dan dampak pengelolaan tercapai
>70%	Sangat Baik	Dikelola Berkelanjutan	Dampak pengelolaan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat seperti kondisi sumber daya yang stabil dan /atau ekonomi masyarakat mulai bergerak



I. Form 1. Berita Acara Lokakarya/workshop/FGD/pertemuan Verifikasi

BERITA ACARA EVALUASI SPESIES ..... (NAMA SPESIES)

Pada hari ini ..... (hari), tanggal ....., bulan ....., tahun ..... bertempat di ..... (nama tempat), .....(kota/kabupaten), telah dilakukan penilaian efektivitas pengelolaan jenis ikan .....(nama ikan).

Tim penilai

1. ....
2. ....
3. ....

Dihadiri oleh \_\_\_ orang yang mewakili beberapa instansi sebagaimana daftar hadir terlampir.

Hasil penilaian disepakati sebagai berikut:

- Skor Penilaian Kriteria Input : .....
- Skor Penilaian Kriteria Proses : .....
- Skor Penilaian Kriteria Output : .....
- Skor Penilaian Kriteria Outcome : .....
- Jumlah Skor Penilaian : .....

Berdasarkan hasil penilaian, spesies..... (nama spesies ) dinyatakan pada tahun ..... mempunyai status .....

Rekomendasi untuk meningkatkan status efektivitas pengelolaan spesies (nama spesies), yaitu:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman.

Nama Kota/Kab, (tanggal bulan tahun)

Ditandatangani oleh para pihak (perwakilan tim penilai, perwakilan UPT, para pihak terkait).

J. Form 2. Berita Acara Verifikasi akhir review

BERITA ACARA EVALUASI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN  
SPESIES ..... (NAMA SPESIES)

Pada hari ini ..... (hari), tanggal ....., bulan ....., tahun ..... bertempat di ..... (nama tempat), .....(kota/kabupaten), telah dilakukan evaluasi terhadap spesies .....(nama spesies)

Penilaian dilakukan dengan dengan susunan tim penilai sebagai berikut:

Ketua :

Anggota : 1.

2.

dan dihadiri oleh perwakilan dari UPT

Nama :

Jabatan :

Hasil penilaian disepakati sebagai berikut:

Skor Penilaian Kriteria Input : .....

Skor Penilaian Kriteria Proses : .....

Skor Penilaian Kriteria Output : .....

Skor Penilaian Kriteria Outcome : .....

Jumlah Skor Penilaian : .....

Berdasarkan hasil penilaian, spesies..... (nama spesies) dinyatakan pada tahun ..... mempunyai status .....

Rekomendasi untuk meningkatkan status efektivitas pengelolaan spesies (nama spesies), yaitu:

1.....

2.....

3.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman.

Nama Kota/Kab,(tanggal bulan tahun)

Ditandatangani oleh para pihak (perwakilan tim penilai dan perwakilan pihak terkait).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL

PENGELOLAAN RUANG LAUT,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pengelolaan Ruang Laut,

ttd.

TB. HAERU RAHAYU